



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Mamuju, 4 September 2026

Nomor : 900.1/947/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Hasil Penilaian Kesesuaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027

Yth. Bupati Majene
di
Tempat

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan penilaian atas kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Majene dengan KEM PPKF Tahun 2027. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyelarasan ini, Pemerintah Kabupaten Majene melakukan penyempurnaan atas rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dilakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Namun dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. Gubernur Sulawesi Barat,
Sekretaris Daerah,



Junda Maulana

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2027

Kode Satker : 992804
Nama Pemda : Kab. Majene
Verifikator : Provinsi Sulawesi Barat

A. Target Makro

Uraian	Nilai Target	Nilai Input	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	6,26	6,26	Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene dalam Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027 sebesar 6,26%. Target pertumbuhan ekonomi tersebut dalam rentang/selaras dengan target angka pertumbuhan ekonomi regional untuk Kabupaten Majene, yaitu sebesar 6,26%, hal tersebut mencerminkan keyakinan Pemerintah Kabupaten Majene terhadap potensi penguatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Selanjutnya komitmen tersebut agar dapat diwujudkan lebih rinci melalui program, kegiatan, sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran yang memadai dalam APBD dan didukung dengan kebijakan yang kondusif bagi peningkatan iklim usaha dan investasi di wilayah Kabupaten Majene. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah pusat juga menjadi hal penting agar upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan.
Tingkat Kemiskinan	12,30	12,30	Target tingkat kemiskinan Kabupaten Majene dalam Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027 sebesar 12,30% telah selaras dengan target KEM PPKF Regional Kabupaten Majene sebesar 12,30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene telah menjadikan sasaran KEM PPKF Regional sebagai salah satu acuan dalam penetapan target pembangunan daerah, sekaligus mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap kemampuan mencapai tingkat kemiskinan sebesar 12,30% pada tahun 2027. Untuk memastikan target tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga realistis dan terukur, Pemerintah Kabupaten Majene perlu memperkuat strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah, terintegrasi, dan berbasis data, melalui peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor produktif, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Di samping itu, koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat, serta para pemangku kepentingan terkait perlu terus ditingkatkan dalam rangka menyelaraskan kebijakan, program, dan sumber pendanaan penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi lintas pemerintah dan stakeholder diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan intervensi, menghindari tumpang tindih program, serta mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan di Kabupaten Majene pada Tahun 2027.

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Keterangan
1. Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Kabupaten Majene belum menarasikan secara memadai narasi KUA pada indikator Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah Kabupaten Majene agar menyampaikan narasi KUA pada indikator Pertumbuhan Ekonomi yang isinya berupa rincian narasi dalam Rancangan KUA yang mencerminkan poin-poin detail dari indikator strategi kewilayahan sebagai berikut: • Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Sistem Keuangan dan Dinamika Bisnis • Reformasi kebijakan PDRD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. • Dan seterusnya ...
2. Penurunan Kemiskinan	Pemerintah Kabupaten Majene belum menarasikan secara memadai narasi KUA pada indikator Penurunan Kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Majene agar menyampaikan narasi KUA pada indikator Penurunan Kemiskinan yang isinya berupa narasi dalam Rancangan KUA yang mencerminkan poin-poin detail dari indikator strategi kewilayahan sebagai berikut: • Refocusing belanja daerah yang berdampak langsung penurunan kemiskinan; (1) peningkatan EWS untuk mendeteksi rumah tangga rentan miskin dan peningkatan level kualitas pelayanan publik seperti akses rekreasi yang mudah dan belanja perumahan untuk memperbaiki deprivasi perumahan agar lebih sejahtera, (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan. • Pemberian insentif PDRD bagi UMKM yang berhasil meningkatkan nilai tambah produknya untuk meningkatkan pendapatan. • Dan seterusnya ...
3. Pendidikan	Pemerintah Kabupaten Majene belum menarasikan secara memadai narasi KUA pada indikator Bidang Pendidikan yang dapat dilihat dari Rancangan KUA Kabupaten Majene. Pemerintah Kabupaten Majene agar menyampaikan narasi KUA pada indikator di bidang Pendidikan yang isinya berupa narasi dalam Rancangan KUA yang mencerminkan poin-poin detail dari indikator strategi kewilayahan sebagai berikut: • Memprioritaskan belanja pendidikan pada pemenuhan layanan dasar pendidikan. • Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. • Dan seterusnya ...
4. Kesehatan	Pemerintah Kabupaten Majene belum menarasikan secara memadai narasi KUA pada indikator Bidang Kesehatan yang dapat dilihat dari Rancangan KUA Kabupaten Majene. Pemerintah Kabupaten Majene agar menyampaikan narasi KUA pada indikator di bidang Kesehatan yang isinya berupa narasi dalam Rancangan KUA yang mencerminkan poin-poin detail dari indikator strategi kewilayahan sebagai berikut: • Menjaga capaian layanan kesehatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan serta memberikan perhatian pada aspek imunisasi dasar lengkap, penanganan stunting, serta penguatan layanan kesehatan. • Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi, ketersediaan makanan dan air, infeksi penyakit, air sanitasi dan lingkungan, kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan dan fasilitas pendidikan. • Dan seterusnya ...

5. Pertanian	Pemerintah Kabupaten Majene belum menarasikan secara memadai narasi KUA pada indikator Bidang Pertanian yang dapat dilihat dari Rancangan KUA Kabupaten Majene. Pemerintah Kabupaten Majene agar menyampaikan narasi KUA pada indikator di bidang Pertanian yang isinya berupa narasi dalam Rancangan KUA yang mencerminkan poin-poin detail dari indikator strategi kewilayahan sebagai berikut: • Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian • Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. • Dan seterusnya ...
6. Perikanan	Pemerintah Kabupaten Majene belum menarasikan secara memadai narasi KUA pada indikator Bidang Perikanan yang dapat dilihat dari Rancangan KUA Kabupaten Majene. Pemerintah Kabupaten Majene agar menyampaikan narasi KUA pada indikator di bidang Perikanan yang isinya berupa narasi dalam Rancangan KUA yang mencerminkan poin-poin detail dari indikator strategi kewilayahan sebagai berikut: • Belanja daerah untuk mendukung pembangunan kapasitas dasar produksi hasil perikanan • Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan.

C.Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Stunting	43%	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 Kabupaten Majene, alokasi anggaran penanganan stunting masih menunjukkan ketidakseimbangan antara intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Alokasi intervensi sensitif sebesar 58,86%, lebih tinggi dari kondisi ideal sebesar 55,01% dengan deviasi 7,00%, sementara intervensi spesifik hanya sebesar 41,14%, lebih rendah dari kondisi ideal 44,99% dengan deviasi minus 8,56%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran penanganan stunting di Kabupaten Majene relatif lebih menitikberatkan pada intervensi sensitif, sementara porsi intervensi spesifik yang secara langsung berkaitan dengan pencegahan dan penanganan masalah kesehatan dan gizi masih perlu diperkuat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene perlu melakukan optimalisasi dan penyesuaian alokasi anggaran pada intervensi spesifik, terutama untuk program yang mendukung peningkatan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, termasuk penguatan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Selain itu, perlu diperkuat intervensi yang mendukung peningkatan kualitas dan kecukupan pangan bergizi, khususnya pemenuhan protein dan mikronutrien, sehingga penganggaran penanganan stunting dapat lebih seimbang, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Majene. Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Pusat perlu semakin ditingkatkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, sehingga dukungan kebijakan, pendanaan, dan intervensi lintas sektor dapat lebih terintegrasi dan efektif dalam mencapai target penurunan stunting tahun 2027.
Indeks 1	0.00%	
Indeks 2	0.00%	
Indeks 3	86.69%	

D. Mandatory Spending

Uraian	KUA (2027)	Persen KUA	Keterangan
Mandatory Spending			
Pendidikan	41.335.800.612	5.19%	Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Majene Tahun 2027, alokasi belanja pendidikan sebesar 5,19% masih belum selaras dengan ketentuan pengalokasian anggaran pendidikan yang mensyaratkan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa prioritas penganggaran pada sektor pendidikan masih berada jauh di bawah batas minimal yang ditetapkan, sehingga berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Majene. Pemerintah Kabupaten Majene disarankan untuk melakukan penyesuaian komposisi belanja daerah dengan meningkatkan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan agar memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan. Optimalisasi alokasi tersebut perlu diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan, serta dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara terpadu dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Infrastruktur	108.375.371.743	15.40%	Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Majene Tahun 2027, alokasi belanja infrastruktur sebesar 15,40% masih belum selaras dengan ketentuan yang mengamanatkan alokasi minimal 40% untuk belanja infrastruktur sesuai kebijakan penganggaran daerah. Rendahnya proporsi anggaran infrastruktur menunjukkan masih terbatasnya dukungan fiskal terhadap penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan konektivitas wilayah. Pemerintah Kabupaten Majene perlu meningkatkan alokasi belanja infrastruktur secara bertahap dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Selain itu, perlu memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan dukungan pendanaan dan pelaksanaan program infrastruktur melalui berbagai sumber pembiayaan yang tersedia.

Belanja Pegawai	522.769.726.564	51.65%	Hasil penelaahan terhadap Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Majene Tahun 2027 menunjukkan bahwa alokasi belanja pegawai mencapai 51,65%, sehingga belum selaras dengan ketentuan yang menetapkan batas maksimal 30% dari total belanja APBD. Tingginya proporsi belanja pegawai mengindikasikan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja yang bersifat operasional, sehingga ruang fiskal untuk mendukung belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi relatif terbatas. Pemerintah Kabupaten Majene disarankan untuk melakukan penataan dan pengendalian belanja pegawai secara bertahap sehingga ruang fiskal daerah nantinya dapat lebih diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pembangunan, pelayanan dasar, dan program strategis daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai proporsi belanja pegawai.
-----------------	-----------------	--------	--

an. Gubernur Sulawesi Barat,
Sekretaris Daerah,



Junda Maulana